

STUDI KASUS PESAN PERLAWANAN JOKOWI DALAM PILPRES 2024: PERSPEKTIF TIR DAN ETIKA JAWA

Azzumar Adhitia Santika

Fakultas Komunikasi, LSPR Institute of Communication and Business.
Jl. K.H. Mas Mansyur No.Kav. 35, Karet Tengsin, Kecamatan Tanah Abang, Kota Jakarta Pusat-10270,
Daerah Khusus Ibukota Jakarta.Indonesia

E-mail:

azzumar.as@lspr.edu

Abstract

The 'Party officer' label which is often communicated by The Indonesian Democratic Party of Struggle (Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan/PDIP) to describe Joko Widodo (Jokowi) became a bad political image for him. It is because Jokowi is seen as a man who always obeys the party, and has no power to argue or oppose them. This qualitative research with case study method aims to observe and analyse how the political move from Gibran Rakabuming Raka, the first born of Jokowi, as Prabowo Subianto's vice president candidate in the 2024 Indonesia Presidential Election (Pemilihan Presiden/Pilpres) could be seen as a symbolic resistance message from Jokowi to PDIP. The result of this research shows that Jokowi uses the denial strategy offered by Theory of Image Restoration (TIR) to deal with the aforementioned bad political image, even though he does not directly deny it as the theory suggest, but indirectly through that symbolic resistance message. This also shows that Javanese ethic is an extreme influence to Jokowi on his practice of politics and communications. The author offer that result as a novelty of this research, specifically in the development of TIR by giving attention to symbolic resistance message as a coping (denying) strategy in the context of Indonesian political public relations.

Keywords: Jokowi, Political Public Relations, Theory of Image Restoration, Javanese Ethics, 2024 Indonesia Presidential Election.

Abstrak

Label 'petugas partai' yang kerap disematkan oleh elit Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) kepada Joko Widodo (Jokowi) menjadi citra politik negatif bagi Presiden Republik Indonesia ke-7 tersebut, sebab hal ini mengesankan bahwa dirinya selalu tunduk dan tidak memiliki kuasa untuk membantah apalagi melawan partai. Riset kualitatif dengan metode studi kasus ini mencoba melihat dan menganalisis bagaimana fenomena majunya putra sulung Jokowi, Gibran Rakabuming Raka, sebagai calon wakil presiden (cawapres) mendampingi Prabowo Subianto di Pemilihan Presiden (Pilpres) 2024 dipandang sebagai pesan simbolik perlawanan dari Jokowi kepada PDIP. Hasil riset ini menunjukkan bahwa Jokowi menggunakan strategi *denial* (menyangkal) sebagaimana yang ditawarkan *Theory of Image Restoration* (TIR) untuk mengatasi citra politik negatif tersebut, meskipun ia tidak menyangkalnya secara langsung sebagaimana yang disarankan teori ini, melainkan melalui pesan simbolik yang dimaksud. Hal ini juga menunjukkan bahwa etika Jawa sangat memengaruhi Jokowi dalam melakoni praktik kekuasaan dan juga komunikasinya. Penulis menawarkan hasil tersebut sebagai kebaruan dari penelitian ini, khususnya bagi pengembangan TIR dengan memberi perhatian pada pesan perlawanan simbolik sebagai strategi menyangkal di dalam konteks *political public relations* di Indonesia.

Kata Kunci: Jokowi, Political Public Relations, Theory of Image Restoration, Etika Jawa, Pemilihan Presiden 2024.

1. Pendahuluan

Joko Widodo (Jokowi) kerap dipandang tidak lebih dari sekadar petugas partai meskipun ia adalah seorang Presiden (Kamal & Sadri, 2023). Label ‘petugas partai’ merupakan cara Megawati Soekarnoputri, Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP) untuk mengontrol Jokowi sebagai agennya agar senantiasa berada dalam koridor kebijakan partai (Alhamid & Permana, 2018). Kalimat “senantiasa berada dalam koridor kebijakan partai” ini dapat dipandang sebagai sebuah kesan yang berujung pada pembentukan citra negatif. Pasalnya Jokowi diframing tidak bisa berbuat banyak, apalagi melakukan perlawanan terhadap partainya.

Citra negatif tersebut semakin diperkuat dengan aksi komunikasi Megawati yang dinilai kerap merendahkan Jokowi, misalnya dengan secara frontal meminta agar PDIP mendapat jatah kursi menteri paling banyak serta mengatakan bahwa ia adalah *mpok*-nya (ibu) Jokowi (Kamal & Sadri, 2023). Sindiran Megawati terhadap Jokowi juga terjadi dalam acara peringatan Hari Ulang Tahun (HUT) ke-50 PDIP, saat ia mengatakan bahwa tanpa PDIP, Jokowi “kasihan” (patut dikasihani karena bisa jadi nasibnya tidak sebaik sekarang) (Yanwardhana, 2023). Di sini terlihat bagaimana Megawati sangat menekankan bahwa Jokowi tidak hanya berhutang budi kepada dirinya seorang, tetapi juga kepada PDIP secara kepartaian.

Selain Megawati, aksi elit PDIP kepada Jokowi pun kerap dipandang publik sebagai sesuatu yang merendahkan. Misalnya ketika Puan Maharani, elit PDIP yang juga merupakan putri kandung Megawati, merekam dan membagikan video momen Jokowi menghadap Megawati menjelang Rapat Kerja Nasional (Rakernas) PDIP di Jakarta. Pada tayangan video, tampak Puan sedang asyik merekam, sementara Jokowi tengah duduk menghadap Megawati. Aksi Puan tersebut oleh banyak pihak dinilai tidak sopan (Arhamni, 2022). Video itu pun mendapatkan banyak

kritik dari warganet karena apa yang tampak di dalamnya dinilai sama sekali tidak menjaga marwah seorang presiden. Banyak pihak yang menilai adegan pada video tersebut selayaknya seorang siswa sedang melakukan konsultasi di ruang guru bimbingan konseling (Firmansyah, 2022).

Aksi yang cenderung merendahkan Jokowi ini tidak hanya dikomunikasikan oleh kalangan elit atas partai. Tetapi bisa dikatakan “cukup holistik” atau menyeluruh di tubuh partai tersebut. Hal ini terlihat dari cerita Romahurmuziy (Rommy) di kanal Youtube Total Politik (2023). Di sana Rommy, yang saat ini merupakan Ketua Majelis Pertimbangan Partai Persatuan Pembangunan (PPP), salah satu partai bagian koalisi pemerintah Jokowi, menceritakan kejadian yang terjadi di Kongres PDIP pertama pasca kemenangan Jokowi pada pemilihan presiden (Pilpres 2014). Saat itu, Jokowi disoraki (diteriaki) oleh seluruh kader PDIP yang hadir di sana. Alasannya adalah karena Jokowi membatalkan pelantikan Budi Gunawan (BG) sebagai Kepala Polisi Republik Indonesia (Kapolri). Sebagaimana diketahui, BG sebelumnya merupakan ajudan dari Megawati saat dirinya menjabat sebagai Wakil Presiden (1999-2000) dan Presiden (2000-2004).

Cerita Rommy di atas menunjukkan bagaimana PDIP benar-benar merasa berkuasa atas Jokowi. Hal ini semakin menegaskan framing dari Megawati bahwa Jokowi sangat berhutang kepada partai tersebut. Di sisi lain, untuk kelancaran karir politiknya, Jokowi seakan memang harus menerima semua itu sebagai sebuah konsekuensi, mengingat ia bukanlah seorang ketua partai maupun bukan berasal dari kalangan elit partai (Panuju, 2027; Alhamid & Permana, 2018). Ketergantungan Jokowi terhadap kekuatan-kekuatan di sekitarnya juga dikritik sebagai bukti kegagalannya melepaskan diri dari jerat kepentingan oligarki (Muhtadi, 2015). Meskipun memang aksi berkompromi dari Jokowi tersebut terbukti sukses mengamankan karirnya sebagai presiden dua periode, akan

tetapi sebagaimana telah penulis sebut sebelumnya, terdapat pula citra negatif mengenai dirinya yang terkesan sangat dikontrol oleh partai.

Akan tetapi menjelang Pilpres 2024, publik dihebohkan dengan majunya Gibran Rakabuming Raka, putra Jokowi, sebagai calon wakil presiden (cawapres) dari Prabowo Subianto. Majunya Gibran dalam kontestasi tersebut menjadi kontroversi sebab didahului dengan adanya putusan Mahkamah Konstitusi (MK) yang memperbolehkan individu berumur di bawah 40 tahun dengan pengalaman menjabat sebagai kepala daerah mendaftarkan diri sebagai cawapres (Fallahnda, 2023). Apalagi, putusan tersebut berujung pada diberhentikannya Anwar Usman dari jabatannya sebagai Ketua MK oleh Majelis Kehormatan Mahkamah Konstitusi (MKMK) karena dinilai melakukan pelanggaran berat terhadap kode etik (Mantalean & Farisa, 2023). Sebagaimana diketahui, Anwar Usman merupakan adik ipar dari Jokowi, yang berarti paman dari Gibran.

Terkait dengan putusan MK tersebut, berdasarkan hasil survei yang dilakukan lembaga Charta Politika (2023), sebanyak 62,3% responden mengatakan mengetahui pemberitaan mengenai putusan MK terkait batas usia capres dan cawapres. Adapun dari angka tersebut, sebanyak 49,9% responden setuju bahwa hal ini merupakan sebuah aksi penyalahgunaan wewenang untuk memudahkan Gibran menjadi cawapres. Kemudian pada pertanyaan lain terkait campur tangan Jokowi dalam putusan ini, sebanyak 39,7% responden menyatakan percaya Jokowi turut campur.

Kontroversi lainnya adalah karena PDIP telah mencalonkan Ganjar Pranowo sebagai capres yang mereka usung di Pilpres 2024. Artinya majunya Gibran mendampingi Prabowo merupakan sebuah aksi yang bertentangan dengan koridor partai. Terkait dengan ini, Wakil Ketua Tim Koordinasi Relawan Pemenangan Pilpres (TKRPP) PDIP Adian Napitupulu bahkan menyebut Jokowi dan keluarganya sudah mengkhianati PDIP

(Hutabarat, 2023). Oleh karenanya di sini terpampang sebuah adegan politik yang menarik, ketika sebelumnya PDIP bertindak seolah sangat berkuasa atas diri Jokowi, namun kini memakai diksi ‘berkhianat’ untuk mendefinisikan sang petugas partai. Artinya, secara tidak langsung PDIP mengakui adanya aksi perlawanan dari Jokowi.

Aksi perlawanan Jokowi terhadap PDIP pada tema besar Pilpres 2024 ini sejatinya sudah diamati oleh Widodo & Dhani (2023) dalam riset mereka terkait aksi Jokowi saat memberi kisi-kisi penerusnya. Saat itu Jokowi menyebut bahwa pemimpin yang baik tampak dari kerutan di wajah dan rambut yang memutih. Meski tak menyebut nama secara gamblang, akan tetapi pesan tersebut seolah mengarah ke Ganjar. Padahal saat itu PDIP belum mengumumkan capres yang akan mereka usung. Artinya, Jokowi dipandang telah melampaui/mendahului keputusan partai.

Oleh karenanya riset ini memposisikan diri sebagai penelitian lebih lanjut dari apa yang sudah dilakukan Widodo & Dhani (2023) sebelumnya. Bahwa aksi komunikasi politik Jokowi dalam konteks Pilpres 2024, terkhusus aksi pembangkangannya terhadap partai, tidak hanya terhenti pada saat ia mendahului PDIP dengan mengkomunikasikan pesan mengenai kisi-kisi pemimpin yang baik. Tetapi setelah fenomena itu, aksi pembangkangan ini rupanya masih berlanjut melalui majunya Gibran mendampingi Prabowo di Pilpres 2024. Kebaruan penelitian yang penulis angkat ini diharapkan dapat semakin memperkaya kajian ilmu komunikasi dalam tema besar pemilihan presiden (dalam konteks ini Pilpres 2024) yang merupakan hajatan politik lima tahunan terbesar bangsa ini.

Berdasarkan paparan logika dari latar belakang di atas, maka sudah jelas bahwa penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana majunya Gibran dalam kontestasi Pilpres 2024 dapat dipandang sebagai sebuah pesan perlawanan dari Jokowi terhadap citra negatif dari label ‘petugas partai’. Adapun dari konteksnya, penelitian ini dapat dikategorikan masuk dalam tema besar *political public*

relations, sebab penelitian ini mencoba melihat bagaimana praktik *public relations* (dalam hal ini adalah manajemen citra) dilakukan oleh aktor politik atau dalam konteks politik. Terkait dengan ini, Kioussis & Strömbäck (2014) menilai bahwa belum begitu banyak eksplorasi dari teori maupun konsep *public relations* yang diaplikasikan dalam bahasan tema besar tersebut. Oleh karenanya, ini menjadi satu *gap* yang menarik untuk diisi.

2. Kajian Pustaka dan Kerangka Pemikiran

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan bagaimana majunya Gibran dalam Pilpres 2024 dapat dipandang sebagai pesan perlawanan Jokowi terhadap citra negatif dari label ‘petugas partai’ yang kerap disematkan oleh PDIP. Oleh karenanya, *political public relations* menjadi satu payung besar yang cocok untuk menaungi penelitian ini. Kioussis & Strömbäck mendefinisikan *political public relations* sebagai proses manajemen oleh organisasi ataupun aktor politik dengan menggunakan aksi komunikasi yang memiliki tujuan tertentu, seperti memengaruhi, serta membangun dan membina reputasi. Di dalamnya juga termasuk upaya membangun dan membina relasi publik-publik kunci yang mampu membantu sang aktor mencapai misi maupun tujuannya (2014, p. 250).

Adapun terkait dengan payung besar tersebut, Kioussis & Strömbäck (2014) mengatakan masih belum banyak eksplorasi dari konsep maupun teori *public relations* yang diaplikasikan pada bahasan terkait tema *political public relations*. Sehingga di sini terdapat satu *gap* teoritis yang menarik untuk diisi. Hal tersebut yang mendorong penulis untuk mencoba mengeksplorasinya dengan menggunakan *Theory of Image Restoration* (TIR) sebagai pisau analisis utama. Terkait dengan TIR itu sendiri, Kriyantono (2017) menjelaskan bahwa TIR disebut juga sebagai *Theory of Image Repair* karena teori ini membahas upaya untuk memperbaiki citra

yang buruk. Oleh karena tujuannya untuk memperbaiki citra yang rusak, maka secara logika jelas bahwa teori ini berfokus pada pemilihan pesan-pesan dalam aktivitas komunikasi guna mencapai tujuan tersebut.

Lebih lanjut Kriyantono mengutip Benoit, Blaney dan lainnya (2017, p.230-231) menjabarkan beberapa strategi yang ditawarkan oleh TIR (dapat dipilih salah satu atau beberapa di antaranya) dalam merestorasi sebuah reputasi, yaitu menyangkal (*denial*), menghindari tanggung jawab (*evasion of responsibility*), mengurangi serangan (*reducing the offensiveness*), tindakan korektif (*corrective actions*), dan terakhir menanggung akibat krisis (*mortification*). Adapun di dalam konteks penelitian Indonesia, TIR terpantau masih relevan dipakai sebagai pisau analisis pada kurun waktu 5 tahun terakhir. Misalnya penelitian dalam lingkup lembaga pemerintahan (Elviani & Karina, 2020; Wibisono, 2022), maupun penelitian dalam lingkup *corporate public relations* (Siregar & Haeirina, 2021). Akan tetapi penelitian yang menggunakan TIR dalam konteks politik, misalnya terhadap tokoh politik dan juga kontestasi pilpres, belum penulis temukan. Apalagi, di dalam riset ini penulis juga akan menambahkan analisis dari perspektif etika Jawa terkait komunikasi dan kekuasaan. Sehingga akan semakin menambah *novelty* atau kebaruan yang ditawarkan penelitian ini, terutama dari sisi *gap* teoritis.

3. Metodologi

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif dengan metode studi kasus. Studi kasus adalah sebuah desain penelitian yang mana peneliti mengembangkan analisis mendalam terhadap suatu kasus, seperti sebuah program, peristiwa, aktivitas, proses ataupun salah satunya (Stake dan Yin dalam Creswell, 2014). Di dalam penelitian ini, peneliti secara dominan menggunakan teknik pengumpulan data dokumentasi, yang ditunjang juga oleh beberapa rekaman video. Dokumentasi yang

dimaksud adalah pemberitaan yang memuat pernyataan dari beberapa elit PDIP merespon fenomena majunya Gibran sebagai cawapres dari Prabowo, juga pernyataan Jokowi dalam menyikapi pencalonan maupun respon dari PDIP tersebut. Pernyataan dari beberapa elit PDIP penulis ambil sebagai data utama dengan tujuan untuk melihat bagaimana pencalonan tersebut membuat partai ini bereaksi. Apalagi berdasarkan hasil penelitian, Jokowi cenderung memainkan pesan yang tidak lugas, sehingga respon dari “lawan” Jokowi perlu dilihat guna mendapatkan gambaran utuh mengenai bagaimana pesan Jokowi tersebut dimaknai.

Pengamatan akan dokumentasi pemberitaan ini dibatasi dari 20 Oktober 2023 pada saat nama Gibran semakin santer diberitakan akan menjadi cawapres dari Prabowo, hingga puncaknya pada awal Januari 2024 saat salah satu elit PDIP, Maruarar Sirait memutuskan hengkang dari partai dengan alasan mengikuti langkah Jokowi, dan kemudian secara resmi mendukung pasangan Prabowo-Gibran. Tidak seluruh pernyataan dalam pemberitaan di rentang waktu tersebut diambil setiap harinya. Hanya pernyataan tertentu yang sekiranya sesuai dan sangat penting dalam konteks penelitian ini yang penulis ambil. Apalagi banyak pemberitaan yang hanya berupa pengulangan dari inti pesan/pernyataan di hari-hari sebelumnya. Hal ini bertujuan untuk menjaga fokus penelitian agar tidak melebar. Sementara data yang diperoleh dari rekaman video adalah beberapa pernyataan dari tokoh politik seperti Rommy (elit PPP, salah satu partai pendukung pemerintahan Jokowi) serta Panda Nababan (politisi senior PDIP) terkait rekam jejak aksi komunikasi politik Jokowi. Data rekaman video tersebut penulis gunakan sebagai data pendukung, dan berbeda konteks waktu dengan sumber data utama yang sebelumnya sudah penulis jabarkan.

Yin (2018) mengatakan terdapat beberapa teknik analisis data yang dapat digunakan dalam riset studi kasus. Salah satu teknik tersebut adalah *explanation building*.

Teknik ini memiliki tujuan untuk menganalisis data dari kasus yang diteliti dengan membangun penjelasan mengenai kasus tersebut. Adapun beberapa poin yang perlu diperhatikan dalam melakukan *explanation building*, yaitu pertama membuat pernyataan teoritis awal atau preposisi yang tentatif. Kemudian kedua, mengkomparasikan temuan atau data yang diperoleh dengan preposisi tersebut. Ketiga, merevisi preposisi awal tersebut setelah dilakukan komparasi pada tahap sebelumnya. Lalu keempat, membandingkan detail-detail dari kasus yang diteliti dengan revisi pada tahapan sebelumnya. Proses ini dapat diulangi terus menerus sebanyak yang diperlukan. Atau dengan kata lain, produk utama dari teknik analisis data ini adalah adanya penjelasan yang matang dari peneliti terkait kasus yang diteliti.

4. Hasil dan Pembahasan

4.1 Majunya Gibran dalam Kontestasi Pemilihan Presiden 2024 sebagai Pesan Perlawanan Jokowi Terhadap Citra Buruk ‘Petugas Partai’ yang Disematkan PDIP

Majunya Gibran sebagai cawapres Prabowo dalam kontestasi Pilpres 2024 membuat geram PDIP. Hal ini terbukti dari pernyataan-pernyataan sejumlah elit partai berlandaskan banteng itu yang semakin mengukuhkan konstruksi kesan tersebut. Politisi senior PDIP Aria Bima mengatakan tidak ikhlas dengan langkah yang ditempuh Jokowi dan Gibran. Ia mempertanyakan apa salah Megawati dan PDIP kepada Jokowi serta keluarga, mengingat segalanya telah diberikan partai (Yahya, 2023). Lebih keras dari itu, Adian Napitupulu yang juga kader partai tersebut, bahkan mengatakan bahwa Jokowi dan keluarga telah melakukan pengkhianatan (Hutabarat, 2023).

Sindiran terhadap Jokowi dari elit PDIP tidak hanya berupa *framing* bahwa ia telah mengkhianati partai. Tetapi juga terhadap bagaimana ia menjalankan roda pemerintahannya. Sekjen PDIP Hasto

Kristiyanto sebagaimana dilaporkan Mahendra (2023) menyebut bahwa saat ini demokrasi di Indonesia berjalan sulit. Hal tersebut lantaran nepotisme telah terlahir kembali di negara ini. Disebutnya nepotisme di sini berkaitan dengan putusan MK yang menjadi pintu masuk Gibran mengikuti kontestasi Pilpres 2024 sebagai cawapres Prabowo. Selain terminologi nepotisme, 'dinasti politik' juga menjadi framing yang juga dikomunikasikan elit PDIP kepada Jokowi. Hal ini disampaikan oleh Ketua Dewan Pembina Partai (DPP) PDIP Djarot Syaiful Hidayat sebagaimana dilaporkan Muliawati (2023).

"Ini kalau masalah dinasti dari sisi keturunan. Ya keturunan, tapi bagaimana kita sekarang ini di masyarakat berkembang 'ini Pak Jokowi bangun dinasti'. Ya ketika dia berkuasa, *lho*, ya, ketika dia berkuasa. Betul di dalam proses demokrasi itu semua orang itu punya hak untuk dipilih dan memilih, boleh semuanya. Tapi ada etikanya, ada batas-batasnya, ada prosesnya, ya," kata Djarot, 30 Oktober 2023 sebagaimana diwartakan Detik pada 30 Oktober 2023.

Kekesalan kader PDIP terhadap langkah politik Jokowi juga tidak hanya dikomunikasikan oleh elit atau golongan atas partai. Kader yang ada di daerah pun menyuarakan ekspresi tersebut. Komang Suparman, seorang kader PDIP di Bali menilai Jokowi sangat tidak berperasaan, padahal ia serta kader-kader lain di daerah telah berdarah-darah memenangkannya sebagai presiden dua periode (Samudero, 2023). Masifnya kekecewaan yang dirasakan oleh kader partai ini ditangkap dan juga ditanggapi oleh Ketua Bidang Politik DPP PDIP, Puan Maharani. Puan meminta agar para kader melupakan kawan lama yang sudah menjadi lawan baru. Hal tersebut disampaikannya dihadapan para kader PDIP Jawa Timur saat meresmikan kantor Tim Pemenangan Daerah (TPD) Ganjar-Mahfud di Surabaya, Jawa Timur (Mantalean & Carina, 2023).

"Jangan lagi ada yang berpikir bahwa kawan yang sudah jadi lawan itu sebenarnya sedang bersandiwara dan aslinya itu tetap bersama kita. Tidak ada itu. Sudah, terima kenyataan bahwa kawan lama sudah menjadi lawan baru," ucap Puan pada 4 November 2023 sebagaimana dikutip dari pemberitaan Kompas 4 November 2023.

Megawati selaku figur paling sentral di PDIP tentu turut memberikan komentarnya. Megawati menilai penguasa saat ini bertindak selayaknya penguasa pada masa Orde Baru. Bahkan, ia juga merasa tidak dihormati sebagai Presiden ke-5 republik ini (Sholihin, 2023). Kalimat "penguasa saat ini" jelas mengarah ke Jokowi, mengingat hingga 20 Oktober 2024, Jokowi merupakan pemangku kekuasaan tertinggi di Republik Indonesia. Sementara pernyataan Megawati tadi masih dalam kurun waktu tersebut.

"Mestinya Ibu *nggak* boleh *ngomong* gitu, tapi sudah jengkel. Tahu *nggak*, kenapa? Republik penuh dengan pengorbanan, tahu tidak? Kenapa sekarang kalian yang baru berkuasa itu mau bertindak seperti zaman Orde Baru?" kata Megawati pada 27 November 2023 sebagaimana diwartakan oleh Detik 27 November 2023.

Pesan Megawati di atas semakin menyempurnakan "kepingan *puzzle*" bahwa kekesalan kader PDIP kepada Jokowi cenderung menyeluruh. Dari mulai kader di daerah, hingga pucuk pimpinan tertinggi. Meskipun memang terdapat pula kader yang ikut membangkang. Misalnya Budiman Sudjatmiko yang memberi dukungan kepada Prabowo jauh sebelum Gibran menjadi cawapres serta Maruarar Sirait yang mundur dari PDIP dengan alasan mengikuti Jokowi (Firmansyah, 2023; Mawardi & Safitri, 2024). Alasan Maruarar tersebut semakin memvalidasi bahwa antara Jokowi dan PDIP sudah tidak dalam satu perahu perjuangan yang sama, sehingga terdapat pilihan ingin ikut

“perahu PDIP” atau “perahu Jokowi”. Tentu ini juga secara tidak langsung mengamini pernyataan Puan mengenai “kawan lama yang sudah menjadi lawan baru”.

Apalagi, beberapa hari setelah Maruarar keluar dari PDIP, ia secara resmi menyatakan dukungannya kepada pasangan Prabowo - Gibran (Achmad & Setuningsih, 2024). Maruarar dalam pernyataannya mengatakan hanya pasangan calon tersebutlah yang dapat melanjutkan kebaikan dari pemerintahan Jokowi. Artinya, pasangan calon lain dianggap tidak merepresentasikan perjuangan politik Jokowi. Termasuk pasangan calon Ganjar - Mahfud yang notabene merupakan pasangan calon dari PDIP.

Alasan keluarnya Maruarar dari PDIP dan ungkapan kemarahan dari para elit partai tersebut secara tidak langsung semakin menguatkan tesis bahwa Jokowi telah melakukan sebuah perlawanan. Diksi “berkhianat”, “meninggalkan partai”, “kawan lama menjadi lawan baru” yang dipilih oleh elit partai berlambang banteng itu untuk mendeskripsikan Jokowi menunjukkan bahwa Jokowi bukan lagi petugas partai yang senantiasa tunduk. Tanpa perlu Jokowi sendiri yang mengkomunikasikan itu secara langsung. Sebab berbeda dengan para elit PDIP yang secara frontal menyampaikan reaksi negatifnya, Jokowi justru terlihat menghindari konfrontasi. Misalnya ketika Megawati menyebut penguasa saat ini bertindak sebagaimana penguasa Orde Baru, Jokowi tak mau memberikan tanggapan. Bahkan Jokowi menyampaikan sikapnya itu sembari tersenyum kepada wartawan (Nugraheny & Ihsanudin, 2023).

"Saya tidak ingin memberi tanggapan," ungkap Jokowi pada 29 November 2023 sebagaimana disadur dari pemberitaan Kompas di tanggal yang sama.

Aksi Jokowi yang enggan memberi komentar ini bukan kali pertama terjadi. Sebelumnya, Hasto Kristiyanto mengatakan PDIP bersedih karena ditinggal Jokowi.

Padahal partai berlambang banteng ini sangat mencintai dan telah memberi banyak keistimewaan kepada mantan Walikota Solo tersebut. Menanggapi pernyataan Hasto, Jokowi lagi-lagi mengatakan bahwa ia tidak ingin berkomentar (Egeham, 2023).

TIR menawarkan beberapa strategi yang dapat digunakan untuk merestorasi citra yang rusak, salah satunya adalah strategi *denial* atau menyangkal, yang di dalamnya terbagi lagi menjadi dua cara yakni menyangkal dengan sederhana atau menyangkal dengan menyalahkan pihak lain (Kriyantono, 2017). Cara kedua tidak digunakan oleh Jokowi. Alih-alih menyalahkan PDIP, Jokowi justru cenderung diam. Hal ini terbukti dari bagaimana sebelumnya Jokowi tidak terlalu memberikan respon perlawanan seperti yang ia lakukan sekarang. Padahal sebagaimana telah penulis elaborasi pada bagian pendahuluan, banyak bukti bagaimana label “petugas partai” yang tersemat pada Jokowi membuat PDIP cenderung bertindak seolah berkuasa secara penuh atas diri Presiden ke-7 Republik Indonesia ini. Bahkan kemarahan dan juga sindiran dari PDIP pasca majunya Gibran sebagai cawapres Prabowo di Pilpres 2024, enggan dikomentari oleh Jokowi. Artinya, Jokowi sendiri terlihat menghindari konfrontasi secara langsung dengan partainya itu.

Sementara cara menyangkal dengan sederhana juga tidak bisa dikatakan sepenuhnya cocok pada kasus ini. Pasalnya, di kasus ini, Jokowi tidak menyangkal citra politik negatifnya tersebut dengan misalnya secara gamblang mengatakan “Saya bukan petugas partai yang selalu patuh dan dapat dikendalikan,”. Melainkan, Jokowi menyangkalnya secara simbolik, yaitu melalui majunya Gibran dalam kontestasi Pilpres 2024 melawan pasangan calon yang diusung oleh PDIP. Kemarahan PDIP di sini menunjukkan bahwa pesan perlawanan simbolik tersebut “telah diterima dengan baik” oleh PDIP. Oleh karenanya, untuk “membongkar kasus ini”, kekecewaan atau kemarahan dari PDIP terkait

fenomena tersebut harus juga disoroti. Sebab, Jokowi tidak menyangkal citra negatif ini secara gamblang dan sederhana. Aksi Jokowi dalam menyangkalnya tersirat melalui bagaimana partai ini menganggap Jokowi berkhianat, menjadi lawan baru, telah meninggalkan partai, maupun pernyataan-pernyataan sejenis.

“Rumitnya” cara Jokowi menyangkal untuk memperbaiki citra negatif tersebut juga penulis harap dapat menjadi unsur *novelty* atau kebaruan dalam riset terkait TIR, yang diharapkan pula dapat turut mengembangkan teori ini. Bahwa selain menyangkal secara sederhana atau menyalahkan pihak lain, individu dapat menyangkalnya secara simbolik. Terkhusus jika kita mengaitkan ini dengan konsepsi dari karakteristik masyarakat *high context culture*, yang sangat didominasi oleh permainan pesan-pesan simbolik, sebagaimana Jawa yang merupakan identitas budaya dari Jokowi. Oleh karenanya, menjadi penting untuk juga menganalisis kasus ini dari perspektif etika Jawa terkait komunikasi dan kekuasaan.

4.2 Etika Jawa dalam Aksi *Political Public Relations* Jokowi

Wartawan senior yang juga merupakan politisi senior PDIP, Panda Nababan dalam diskusi yang disiarkan kanal YouTube Indonesia Lawyers Club (2022) menceritakan mengenai gaya berpolitik Jokowi. Jokowi dinilai memiliki bakat dan reputasi untuk membalas perbuatan atau perlakuan yang kurang mengenakan baginya. Salah satu kisah yang diangkat adalah saat Jokowi membalas cibiran Prabowo menjelang Pilpres 2014. Saat itu, di hadapan beberapa tokoh nasional Prabowo mencibir bahwa Jokowi adalah tukang andong dan tidak pantas menjadi presiden. Adapun pilpres edisi tersebut diikuti oleh dua pasang calon, yaitu Prabowo Subianto - Hatta Rajasa dan Jokowi - Jusuf Kalla, yang mana dimenangkan oleh pasangan kedua. Jokowi yang mengetahui bahwa Prabowo pernah mencibirnya, kemudian

menyiapkan andong untuk kirab budaya kemenangan sebagai Presiden Indonesia ke-7.

“SBY (Susilo Bambang Yudhoyono, Presiden Republik Indonesia ke-6) sudah bikin skenario, habis dari MPR, pisah sambut di Istana. Butuh waktu satu jam. Apa yang terjadi? Jokowi berhenti di Bundaran HI, naik andong dia, 3,5 jam keliling-keliling Monas. Ga ada urusan acaranya SBY. Hanya menunjukan, Prabowo kalau lihat televisi, dia lihat tukang andong,” cerita Panda Nababan mengenai kejadian tersebut dalam program televisi Indonesia Lawyers Club yang diunggah di media Youtube pada 20 November 2022.

Berdasarkan keterangan Panda di atas, maka dapat dikatakan bahwa majunya Gibran sebagai cawapres Prabowo di Pilpres 2024 memiliki pola yang sama dengan aksi Jokowi dalam membalas cibiran ‘tukang andong’ yang pernah dilontarkan Prabowo di 2014 silam. Persamaan tersebut adalah Jokowi cenderung membalas tindakan negatif terhadapnya tidak secara tersurat. Melainkan, Jokowi membalasnya melalui pesan-pesan simbolik. Pada kasus ini, pesan simbolik tersebut terbukti berhasil membuat PDIP marah atau kecewa

Etika Jawa menekankan pentingnya kerukunan, dan juga mengedepankan keharmonisan yang tersaji dari kehati-hatiannya dalam bertutur kata, serta laku santun dalam keseharian (Suseno, 1984; Chalik, 2015). Artinya, aksi komunikasi yang sesuai berdasarkan etika Jawa adalah aksi komunikasi yang jauh dari sikap konfrontasi. Jokowi telah menunjukkan ini dalam upaya menyangkal citra negatif ‘petugas partai’ yang selama ini melekat padanya. Sebagaimana telah dibahas sebelumnya, aksi *political public relations* Jokowi untuk merestorasi citra negatif itu tidak dia lakukan secara frontal. Melainkan, ia memainkan pesan perlawanan tersebut secara simbolik melalui majunya Gibran pada kontestasi Pilpres 2024 melawan pasangan calon dari PDIP. Terlepas dari

kontroversi sebagai buntut dari pencalonan tersebut, akan tetapi yang menjadi fokus dalam pembahasan ini adalah bagaimana cara Jokowi dalam mengkomunikasikan pesan kepada PDIP. Pada konteks ini, Jokowi terlihat sangat menghindari adanya perang verbal yang sangat terbuka atau frontal tersaji ke publik. Atau dengan kata lain, Jokowi juga masih berupaya menjunjung adanya kesan keharmonisan.

Kemampuan Jokowi untuk membalas pesan maupun tindakan dari lawan politiknya secara simbolik ini juga menunjukkan bahwa sejatinya Jokowi memiliki kuasa penuh dalam bertindak. Tesis ini dibenarkan oleh Rommy, elit PPP. Rommy di kanal Youtube Total Politik (2023) bercerita betapa kagetnya Luhut Binsar Pandjaitan ketika di-*reshuffle* Jokowi dari posisi Menko Polhukam menjadi Menko Marves, tanpa sebelumnya ada perbincangan terkait. Padahal, Luhut kerap dianggap sebagai pembisik Jokowi, atau dengan kata lain orang yang mengatur Jokowi.

“Menurut saya (ini) menunjukkan Pak Jokowi *in control*. *In full control*,” terang Rommy dalam konten Youtube Total Politik pada 26 April 2023.

Berkaitan dengan tesis di atas, Widodo & Dhani (2023) juga mengamini bahwa Jokowi sejatinya sangat menyadari besaran kekuasaan yang dimilikinya sebagai seorang presiden. Bahkan di dalam riset mereka, Jokowi disebut sebagai “*supreme leader*” yang benar-benar memiliki otoritas penuh sebagaimana etika Jawa memandang kekuasaan. Terkait dengan ini, Anderson (2007) beranggapan bahwa budaya Jawa memandang kekuasaan sebagai suatu hal yang konkret, dan karena sifatnya yang konkret itu, maka ia tak perlu lagi dipertanyakan.

Pemahaman Jokowi yang sangat baik atas kekuasaan yang ia miliki juga tercermin dari bagaimana dirinya bisa dengan bebas mengkomunikasikan pesan. Sebelumnya, pada November 2022 lalu, Jokowi pernah mengatakan di hadapan ribuan relawan bahwa pemimpin yang memikirkan rakyat itu terlihat dari rambutnya yang putih dan juga ada kerutan di wajah (Noviansyah, 2022). Meski

tidak menyebut langsung sebuah nama, akan tetapi pesan Jokowi tersebut seolah menjadi kode bahwa ia mendukung Ganjar Pranowo, yang pada akhirnya menjadi capres yang diusung PDIP (Widodo & Dhani, 2023). Akan tetapi, majunya Gibran mendampingi Prabowo dianggap PDIP sebagai bukti bahwa Jokowi berubah atau tidak konsisten, padahal sebelumnya Jokowi terkesan memberi restu kepada Ganjar (Kaftaro, 2023).

“Ketidakkonsistenan” Jokowi dalam menyampaikan pesan juga terlihat dari bagaimana ia memberikan restu ke Gibran untuk maju dalam Pilpres 2023. Berdasarkan laporan Ramadhan & Santosa (2023) pada Mei 2023, Jokowi menilai isu majunya Gibran mendampingi Prabowo di Pilpres 2024 tidak logis, mengingat usia Gibran masih muda (dan pada saat itu belum ada putusan MK yang menjadi pintu bagi Gibran untuk maju dalam kontestasi Pilpres 2024), juga Gibran baru dua tahun menjadi walikota. Akan tetapi di penghujung Oktober 2023, setelah Gibran resmi maju mendampingi Prabowo, Jokowi justru memberikan restunya.

“Orang tua itu tugasnya hanya mendoakan dan merestui. Karena sudah dewasa, jangan terlalu mencampuri urusan yang sudah diputuskan oleh anak-anak kita,” kata Jokowi pada 22 Oktober 2023 sebagaimana dilaporkan Kompas pada 23 Oktober 2022.

Perbedaan sikap tersebut tidak penulis lihat sebagai inkonsistensi Jokowi. Akan tetapi, hal ini justru dapat dilihat sebagai bukti bahwa Jokowi sangat paham dan menyadari konkretnya kekuasaan yang ia miliki. Termasuk di dalamnya adalah memiliki kuasa penuh dalam berkomunikasi. Apalagi, berdasarkan analisis di atas, perlu dicatat bahwa Jokowi kerap memainkan pesan simbolik dan syarat makna. Artinya, sering kali pesan Jokowi tidak bisa dilihat dan dimaknai secara parsial. Tetapi perlu untuk dikaitkan pula dengan konteks yang lebih holistik.

Apalagi, Jokowi juga pernah berujar bahwa dirinya akan *cawe-cawe* atau ikut campur dalam Pilpres 2024 ini, meskipun ia memastikan bahwa *cawe-cawe* itu dalam hal yang positif bagi bangsa dan negara (Ginting, 2023). Pesan Jokowi ini semakin menguatkan kesan bahwa di penghujung masa kekuasaannya, Jokowi ingin menunjukkan ia benar-benar berkuasa penuh. Termasuk berkuasa penuh untuk turut *cawe-cawe* di dalam urusan transisi kekuasaan. Dalam konteks penelitian ini, pesan simbolik perlawanan Jokowi terhadap PDIP melalui majunya Gibran dalam Pilpres 2024, dapat dijustifikasi sebagai bentuk *cawe-cawe* tersebut.

Adapun, etika politik Jawa juga memandang bagaimana sebuah kondisi bisa dikatakan stabil. Sebuah kekuasaan dikatakan kokoh apabila tidak ada lagi kekacauan, intrik, perlawanan ataupun pemberontakan serta gangguan ketentraman di wilayahnya (Suseno, 1984). Artinya, pemberontakan atau perlawanan dapat dilihat sebagai sebuah gugatan terhadap kekuasaan yang ada. Oleh karenanya, berdasarkan analisis yang penulis paparkan di atas, majunya Gibran sebagai cawapres dari Prabowo di Pilpres 2024 dapat dipandang sebagai pesan Jokowi untuk menggugat “kekuasaan” PDIP terhadap dirinya, yang selama ini dianggap nyata.

5. Kesimpulan

Jokowi melawan citra negatif dari label ‘petugas partai’ yang sering disematkan oleh PDIP kepadanya melalui pesan perlawanan simbolik. Majunya Gibran sebagai cawapres Prabowo dapat dipandang sebagai pesan perlawanan simbolik tersebut. Temuan dari riset ini juga turut memberikan sumbangsih pada pengembangan TIR, terutama di dalam konteks *political public relations* di Indonesia. Bahwa untuk menyangkal (*denial*) sebuah citra negatif atau sebuah peristiwa yang mampu mengkonstruksi citra negatif, individu (aktor politik) dapat pula melakukannya melalui aksi komunikasi simbolik. Meskipun

ini lebih rumit dari sekadar membuat pernyataan bantahan atas citra, peristiwa maupun krisis yang tengah eksis. Akan tetapi di dalam karakteristik masyarakat *high context culture*, sebagaimana identitas budaya Jawa dalam karakter Jokowi, potensi dari permainan pesan-pesan simbolik ini penting untuk diperhatikan.

Kemudian, riset ini juga semakin membuktikan bahwa perspektif barat (*western perspective*) dan perspektif timur (*eastern perspective*) di dalam diskursus keilmuan komunikasi bukanlah dua hal yang harus dipertentangkan. Melainkan dua hal yang dapat memperkuat serta memperkaya satu sama lain, yang pada akhirnya dapat berkontribusi positif terhadap pengembangan ilmu komunikasi itu sendiri. Di dalam penelitian ini, perspektif dari TIR yang penulis gunakan sebagai pisau analisis semakin dipertajam dengan perspektif etika Jawa sebagai “alat mengasah” dari pisau tersebut.

Adapun keberhasilan Jokowi dalam menunjukkan perlawanannya bukan tidak mungkin dapat mengkonstruksi citra negatif baru. Misalnya citra negatif dari menggemanya isu dinasti politik. Oleh karenanya penulis merekomendasikan penelitian selanjutnya untuk mengeksplorasi topik tersebut, dalam rangka semakin mengembangkan khasanah keilmuan komunikasi pada tema terkait.

Daftar Pustaka

Achmad, N. M., & Setuningsih, N. (2024, January 19). Eks Politikus PDI-P Maruarar Sirait Resmi Dukung Prabowo-Gibran. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2024/01/19/18024721/eks-politikus-pdi-p-maruarar-sirait-resmi-dukung-prabowo-gibran>.

- Alhamid, A., & Permana, A. (2018). Presidentialized Party di Indonesia: Kasus Perilaku PDI-P dalam Pencalonan Joko Widodo pada Pilpres 2014. *Jurnal Politik*, 3(2), 3-31. DOI: 10.7454/jp.v3i2.125.
- Anderson, B. R. O. G. (2007). The idea of power in Javaness culture. In C. Holt (Ed.). *Culture and politics in Indonesia*. Jakarta: Equinox Pub.
- Arhamni, A. N. (2022, June 21). Puan Maharani Sibuk Nge-Vlog saat Jokowi Menghadap Megawati, Momen Langka Jelang Rakernas Bikin Geger! Retrieved from <https://disway.id/read/514555/puan-maharani-sibuk-nge-vlog-saat-jokowi-menghadap-megawati-momen-langka-jelang-rakernas-bikin-geger>.
- Chalik, A. (2015). Sintesis mistik dalam kepemimpinan politik Jawa. *Jurnal Review Politik*, 5(2), 254-278.
- Charta Politika. (2023). Peta elektoral pasca putusan mk & pendaftaran capres-cawapres: Periode survei 26-31 Oktober 2023. Retrieved from <https://www.chartapolitika.com/survei-charta-politika-gibran-tak-pantas-jadi-cawapres/>
- Creswell, J. W. (2014). *Research design: Qualitative, quantitative, and mixed methods approaches* (4th ed). Thousand Oaks, California: Sage Publications.
- Egeham, L. (2023, October 31). Jokowi Enggan Tanggapi Tudingan soal Tinggalkan PDIP. Retrieved from <https://www.liputan6.com/news/read/5437482/jokowi-enggan-tanggapi-tudingan-soal-tinggalkan-pdip>.
- Elviani, M., & Karina, N, R, D. (2020). Strategi komunikasi humas dalam memperbaiki citra Kementerian Pemuda dan Olahraga. *CARAKA : Indonesian Journal of Communications*, 1(1), 2020, 38-43.
- Fallahnda, B. (2023, October 23). Timeline Perjalanan Gibran dari 23 Juni Hingga Jadi Cawapres. Retrieved from <https://tirto.id/timeline-dan-kronologi-gibran-dari-23-juni-hingga-jadi-cawapres-prabowo-gRm4>.
- Firmansyah, T. (2022, June 22). Viral Video Jokowi Bak Menghadap Megawati, Pengamat: Tak Elok Dipertontonkan. Retrieved from <https://news.republika.co.id/berita/rdvo-d0377/viral-video-jokowi-bak-menghadap-megawati-pengamat-tak-elok-dipertontonkan>
- Firmansyah, T. (2023, August 24). Budiman Sudjatmiko Resmi Dipecat dari PDIP. Retrieved from https://news.republika.co.id/berita/rzwo-0h377/budiman-sudjatmiko-resmi-dipecat-dari-pdip#google_vignette.
- Ginting, A. D. (2023, May 29). Jokowi: Demi Bangsa dan Negara ke Depan, Saya Akan Cawe-cawe. Retrieved from https://news.detik.com/pemilu/d-6745592/jokowi-demi-bangsa-dan-negara-ke-depan-saya-akan-cawe-cawe?_gl=1*17ga2sm*_ga*dGpIT3ZTRE1VY0ZxWExUZfV6XzNYWWRFeTd1aFpaMG51bDg1bGo5Tk5HWFZReTBvY0ljQmpoNGZQbHU1cV9UeQ..*_ga_CY42M5S751*MTcwMDU0MzM0NC4zLjAuMTcwMDU0MzUyNy42MC4wLjA.
- Hutabarat, D. (2023, October 25). Adian Sebut Faktor Utama Pengkhianatan Jokowi karena PDIP Tolak Tiga Periode. Retrieved from <https://www.liputan6.com/pemilu/read/5432592/adian-sebut-faktor-utama-pengkhianatan-jokowi-karena-pdip-tolak-tiga-periode?page=2>
- Indonesia Lawyers Club. (2022, November 20). Panda Saksi Hidup Jokowi - Paloh "Mereka Punya Reputasi Membalas!!!" [Video file]. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=mUhwU3GhKr0>.
- Kaftaro, M. F. (2023, November 2). PDIP Sebut Mega-Jokowi Sepakat Capreskan Ganjar Sejak 18 Maret. Retrieved from <https://news.detik.com/pemilu/d->

- 7016288/pdip-sebut-mega-jokowi-sepakat-capreskan-ganjar-sejak-18-maret.
- Kamal, U.S., & Sadri. (2023). Komunikasi Politik Megawati Soekarnoputri Terhadap Kepemimpinan Jokowi dalam Pemberitaan Metro TV. *AL-IMARAH: Jurnal Pemerintahan dan Politik Islam*, 8(1), 21-32.
- Kiousis, S., & Strömbäck, J. (2014). Political Public Relations. In C. Reinemann (Ed.). *Political Communication*. Berlin, Boston: De Gruyter Mouton.
- Kriyantono, R. (2017). *Teori-teori public relations perspektif barat dan lokal: Aplikasi penelitian dan praktik*. Jakarta: Kencana Prenada Media.
- Mahendra, R. A. (2023, October 28). Hasto PDIP Bicara Sulitnya Demokrasi karena Kembalinya Nepotisme. Retrieved from <https://news.detik.com/pemilu/d-7006440/hasto-pdip-bicara-sulitnya-demokrasi-karena-kembalinya-nepotisme>.
- Mantalean, V., & Carina, J. (2023, November 4). Puan Maharani Minta Relawan Relakan "Kawan Lama yang Sudah Jadi Lawan Baru". Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2023/11/04/15384681/puan-maharani-minta-relawan-relakan-kawan-lama-yang-sudah-jadi-lawan-baru>.
- Mantalean, V., & Farisa, F. C. (2023, November 7). Anwar Usman Diberhentikan dari Ketua MK karena Pelanggaran Berat. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2023/11/07/18264471/anwar-usman-diberhentikan-dari-ketua-mk-karena-pelanggaran-berat>.
- Mawardi, I., & Safitri, E. (2024, January 17). Pesan 'Jagalah Jokowi' di Balik Maruarar Sirait Tinggalkan PDIP. Retrieved from <https://news.detik.com/pemilu/d-7145456/pesan-jagalah-jokowi-di-balik-maruarar-sirait-tinggalkan-pdip>.
- Muhtadi, B. (2015) Jokowi's First Year: A Weak President Caught between Reform and Oligarchic Politics, *Bulletin of Indonesian Economic Studies*, 51:3, 349-368, DOI: 10.1080/00074918.2015.1110684.
- Muliawati, A. (2023, October 30). Djarot Ngaku PDIP Anti Dinasti Politik, Sebut Jokowi Ingin Gibran-Bobby Maju. Retrieved from <https://news.detik.com/pemilu/d-7010034/djarot-ngaku-pdip-anti-dinasti-politik-sebut-jokowi-ingin-gibran-bobby-maju>.
- Noviansyah, W. (2022, November 26). Ciri-ciri Pemimpin Mikir Rakyat Versi Jokowi: Rambut Putih dan Kerut di Wajah. Retrieved from <https://news.detik.com/pemilu/d-6427656/ciri-ciri-pemimpin-mikir-rakyat-versi-jokowi-rambut-putih-dan-kerut-di-wajah>.
- Nugraheny, D. E., & Ihsanuddin. (2023, November 29). Megawati Sebut Sikap Penguasa seperti Orde Baru, Jokowi: Saya Tak Ingin Beri Tanggapan. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2023/11/29/09180751/megawati-sebut-sikap-penguasa-seperti-orde-baru-jokowi-saya-tak-ingin-beri>.
- Panuju, R. (2017). KOMUNIKASI POLITIK JOKOWI: ANTARA PENCITRAAN DAN JEJARING POLITIK. *Jurnal Komunikatif*, 6(2), 92-105.
- Ramadhan, A., & Santosa, B. (2023, October 23). Beda Sikap Jokowi soal Gibran Maju Pilpres: Dulu Singgung Logika, Kini Merestui. Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2023/10/23/10205711/beda-sikap-jokowi-soal-gibran-maju-pilpres-dulu-singgung-logika-kini?page=all>.
- Samudero, R. S. (2023, November 2). Ditanya Kader soal Sikap Jokowi ke PDIP, Ini Jawab Ganjar. Retrieved from <https://www.detik.com/bali/berita/d-7015717/ditanya-kader-soal-sikap-jokowi-ke-pdip-ini-jawab-ganjar>.
- Sholihin, M. (2023, November 27). Megawati:

Kenapa Yang Baru Berkuasa Itu Mau Bertindak Seperti Orde Baru? Retrieved from <https://news.detik.com/pemilu/d-7059670/megawati-kenapa-yang-baru-berkuasa-itu-mau-bertindak-seperti-orde-baru>.

ed). Thousand Oaks, California: Sage Publications.

- Siregar, I. K. & Haeirina, K. P. (2021). Komunikasi krisis PT. Jouska Finansial Indonesia dalam pemulihan citra perusahaan. *Jurnal Pustaka Komunikasi*, 4(1), 1-10.
- Suseno, F. M. (1984). *Etika Jawa: Sebuah analisa falsafi tentang kebijaksanaan hidup Jawa*. Jakarta: Gramedia.
- Total Politik. (2023, April 26). PPP Capreskan Ganjar, Romahurmuziy Bongkar Peluang Sandiaga Dan Khofifah Jadi Cawapres! [Video file]. Retrieved from <https://www.youtube.com/watch?v=ZTkPMVKJR3o>.
- Wibisono, S. (2022). Strategy for image restoration public relations of Bekasi city government in image recovery efforts. *Proceedings of The 2nd ICHELSS*, 107-115.
- Widodo, A. S., & Dhani, R. (2023). When the president endorses the nation's next leader: Detecting the concept of power in Javanese culture through presidential communication. *WARTA Ikatan Sarjana Komunikasi Indonesia*, 6(1), 94-106.
- Yahya, A. N. (2023, October 21). Politikus PDI-P: Pak Jokowi dan Gibran, Ada Apa? Bu Mega Salah Apa? Retrieved from <https://nasional.kompas.com/read/2023/10/21/16022521/politikus-pdi-p-pak-jokowi-dan-gibran-ada-apa-bu-mega-salah-apa>.
- Yanwardhana, E. (2023, January 10). Megawati: Pak Jokowi itu Kalau Nggak Ada PDIP Kasihan Dah. Retrieved from <https://www.cnbcindonesia.com/news/20230110121254-4-404266/megawati-pak-jokowi-itu-kalau-nggak-ada-pdip-kasihan-dah>.
- Yin, R. K. (2018). *Case study research and applications: design and methods* (6th